

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.04.2.692043/2025

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

- B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 - 2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 - 3. Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
 - 4. Kode>Nama Satker : (692043) BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG
 - Sebesar : Rp. 7.069.823.000 (TUJUH MILIAR ENAM PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	3.195.143.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	3.874.680.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

- D. Pencairan dana dilakukan melalui :
- 1. KPPN MAKASSAR II (136) Rp. 7.069.823.000

- E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 - 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
 - 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 - 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 - 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 - 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

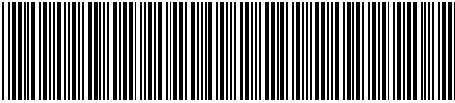
ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 135.04.2.692043/2025

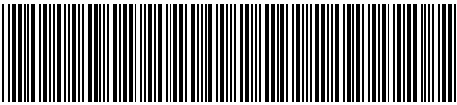


DS:9204-1259-0080-9883

Satker : (692043) BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG

BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	2.517.927.000
BF.7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp.	2.517.927.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	4.551.896.000
WA.7113	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP	Rp.	4.551.896.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692043/2025
I A. INFORMASI KINERJA



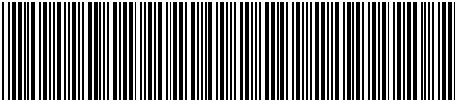
DS:9204-1259-0080-9883

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (692043) BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG

Halaman : I A. 1

Program	:	135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				2.517.927.000
Kegiatan	:	7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah				2.517.927.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan				
		2. 01	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah				
		3. 01	Persentase Permohonan Layanan BHP yang diselesaikan				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	5,00	layanan		2.517.927.000
Rincian Output	:	01	BAH.002 Layanan Balai Harta Peninggalan	5.00	layanan		2.517.927.000
Program	:	135.04.WA	Program Dukungan Manajemen				4.551.896.000
Kegiatan	:	7113	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP				4.551.896.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi RB di lingkup BHP				
		2. 02	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7113.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		3.581.583.000
Rincian Output	:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan		1.600.000
		02	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan		122.042.000
		03	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan		262.798.000
		04	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan		3.195.143.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7113.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	19,00	Unit, m2, Paket		631.939.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	19.00	Unit		631.939.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692043/2025
I A. INFORMASI KINERJA

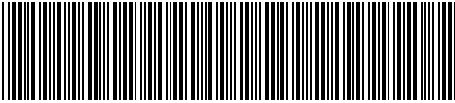


DS:9204-1259-0080-9883

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (692043) BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG

Klasifikasi Rincian Output	3	:	7113.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	26,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	189.382.000
Rincian Output		:	01	EBC.001 Layanan Pengelolaan SDM	1.00	Layanan	95.371.000
		:	02	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	25.00	Orang	94.011.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7113.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	148.992.000
Rincian Output		:	01	EBD.001 Layanan Pengelolaan Anggaran	1.00	Dokumen	73.657.000
		:	02	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Dokumen	48.834.000
		:	03	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen	25.141.000
		:	04	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Laporan	1.360.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692043/2025
I B. SUMBER DANA



DS:9204-1259-0080-9883

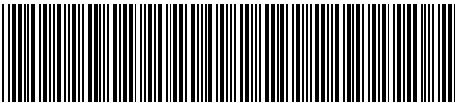
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (692043) BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	7.069.823.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	3.195.143.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	3.874.680.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692043/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



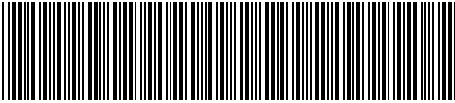
DS:9204-1259-0080-9883

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (692043) BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692043	BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG	1.898.293	4.539.591	631.939	-	-	7.069.823	19 . 51	
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.517.927	-	-	-	2.517.927		
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	2.517.927	-	-	-	2.517.927		
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	2.517.927	-	-	-	2.517.927		
04	PNBP	-	2.517.927	-	-	-	2.517.927		
135.04.WA	Program Dukungan Manajemen	1.898.293	2.021.664	631.939	-	-	4.551.896		
7113	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP	1.898.293	2.021.664	631.939	-	-	4.551.896		
7113.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	1.898.293	1.683.290	-	-	-	3.581.583		
01	RM	1.898.293	1.296.850	-	-	-	3.195.143		
04	PNBP	-	386.440	-	-	-	386.440		
7113.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	-	631.939	-	-	631.939	19 . 51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692043/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:9204-1259-0080-9883

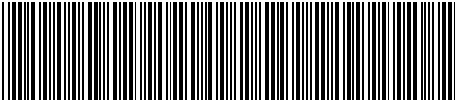
Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (692043) BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 PNB		-	-	631.939	-	-	631.939	136	
7113.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	189.382	-	-	-	189.382	19 . 51	
04 PNB		-	189.382	-	-	-	189.382	136@	
7113.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	148.992	-	-	-	148.992	19 . 51	
04 PNB		-	148.992	-	-	-	148.992	136@	
JUMLAH		1.898.293	4.539.591	631.939	-	-	7.069.823		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692043/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:9204-1259-0080-9883

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode/Nama Satker : (692043) BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG

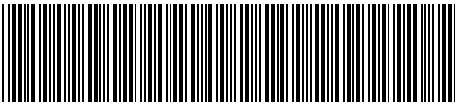
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692043	BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	117.535	1.181.313	1.048.683	1.220.272	920.658	663.579	600.889	333.007	410.184	189.595	183.334	200.773	7.069.823
		BELANJA PEGAWAI	108.518	129.991	270.404	132.033	138.816	270.238	134.439	138.816	138.816	134.404	132.576	169.241	1.898.293
		BELANJA BARANG	9.016	1.051.323	614.610	1.000.908	400.903	393.341	466.450	194.191	271.368	55.191	50.758	31.532	4.539.591
		BELANJA MODAL	0	0	163.669	87.331	380.939	0	0	0	0	0	0	0	631.939
		135.04.BF.7110 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	649.647	389.188	614.117	271.692	242.034	180.304	82.202	88.743	0	0	0	2.517.927
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	649.647	389.188	614.117	271.692	242.034	180.304	82.202	88.743	0	0	0	2.517.927
		135.04.WA.7113 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP	117.535	531.667	659.495	606.155	648.967	421.545	420.585	250.806	321.441	189.595	183.334	200.773	4.551.896
		51 BELANJA PEGAWAI	108.518	129.991	270.404	132.033	138.816	270.238	134.439	138.816	138.816	134.404	132.576	169.241	1.898.293
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	9.016	401.676	225.422	386.790	129.211	151.307	286.146	111.989	182.625	55.191	50.758	31.532	2.021.664
		53 BELANJA MODAL	0	0	163.669	87.331	380.939	0	0	0	0	0	0	0	631.939

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692043/2025
IV A. B L O K I R



DS:9204-1259-0080-9883

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [692043] BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG

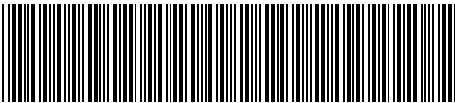
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692043	BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG	7113.EBC	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 1.214.963		Layanan Manajemen SDM Internal
	52 Belanja Barang Rp. 1.214.963		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.012
			Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
			524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 680
			Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	7113.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 71.439
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 847.348		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.060
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 26.605		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		
135.04.WA		7113.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 171.258		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 68.691
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.870		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.870
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
7113	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP		
7113.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 68.691		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.870		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692043/2025
IV B. C A T A T A N



DS:9204-1259-0080-9883

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [692043] BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO